

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran mengenai suatu pencapaian yang dicapai oleh suatu organisasi baik itu organisasi sektor publik maupun swasta. Menurut Sujarweni (dalam Kusnadi, 2018) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan misi dan visi organisasi. Bastian (dalam Patarai 2018:261) memaparkan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja dalam suatu organisasi sangat penting agar kita dapat mengetahui akuntabilitas suatu organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Dalam hal akuntabilitas bukan berarti bahwa organisasi tersebut hanya menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan atau digunakan, melainkan bagaimana uang publik tersebut digunakan secara baik, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (dalam Kusnadi 2018:13) suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga (3) maksud :

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Patarai (2018:262) Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk :

- 1) Memastikan pemahaman para pelaksanaan dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja
- 2) Memastikan tercapainya skema yang disepakati
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
- 4) Membantu memahami proses kegiatan Instansi Pemerintah
- 5) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
- 6) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan

2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (dalam Kusnadi 2018:14) manfaat pengukuran kinerja diantaranya :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja
- 4) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

2.2 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang sangat penting karena laporan keuangan merupakan sarana untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil apa saja yang telah dicapai selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh perusahaan saja melainkan laporan keuangan juga dibuat pada pemerintahan, misalnya pada pemerintah provinsi/kota/daerah hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah diserahi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, sehingga pemerintah provinsi/kota/daerah harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya atau hasil apa saja yang telah dicapai dalam wujud laporan keuangan. Selain itu juga dalam mengelola keuangannya pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan sebagai bukti dari akuntabilitas dan transparan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangannya. Jika dalam perusahaan penyusunan laporan keuangannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), lain halnya di pemerintahan yang menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Bab 1 pasal 1: “Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode”.

Menurut Munawir (dalam Herawati 2019) mendefinisikan laporan keuangan merupakan laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Menurut IAI (dalam Herawati 2019) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah diharuskan agar memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi, dalam artian bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Mahmudi (2019:2) terdapat 2 alasan

mengapa pemerintah daerah perlu menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan, yaitu :

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal yaitu pertanggungjawaban kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Daerah kepada pegawai Pemda dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakat, investor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social dan politik. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan yang disajikan harus tepat waktu dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, tidak bias dan terbebas dari salah saji material dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Mahmudi (2019:13) Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan mengenai posisi keuangan

pemerintah daerah serta menyajikan informasi mengenai transaksi-transaksi yang telah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari pemerintah daerah.

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut SAP dalam (Mahmudi:2019) tujuan pelaporan keuangan terdiri dari

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (dalam Yuniarti 2015) tujuan umum laporan keuangan bagi organisasi pemerintahan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasinya .

2.2.2 Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019), manfaat penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan tingkat likuiditas, solvabilitasnya, leverage, surplus/deficit, dan kesinambungan fiskal.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

2.2.3 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan pokok terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menggambarkan atau menginformasikan mengenai kepatuhan pemerintah pusat/daerah dalam mengelola APBN/APBD yang nantinya akan dibandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam

satu periode pelaporan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari /kepada entitas elaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan /pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Pos-pos dalam laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih meliputi:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. saldo anggaran lebih akhir

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang di dalamnya mencakup asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Komponen-komponen dalam neraca terdiri dari:

- a. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai manfaat ekonomi dimasa yang akan datang serta dapat diukur dengan satuan uang. Asset dalam neraca terdiri dari empat macam yaitu asset lancar, investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya.
- b. Kewajiban memberikan informasi mengenai utang pemerintah daerah yang penyelesaiannya akan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban terdiri dari dua jenis yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah dimana kekayaan tersebut merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai segala kegiatan operasional keuangan suatu entitas pelaporan yang mana di dalamnya terdiri dari pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit-LO yang nantinya akan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh pemerintah daerah. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyampaikan informasi mengenai segala pengeluaran dan pemasukan kas dalam suatu entitas pada tahun pelaporan. Laporan arus kas sendiri terdiri dari empat aktivitas di dalamnya yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun

sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas meliputi ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan keuangan berisikan penjelasan atau rincian atas angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional maupun Laporan Arus Kas serta dalam CaLK sendiri juga memuat mengenai kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas pelaporan yang bersangkutan. Menurut Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, CaLK mengungkapkan/ menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- 2) Menyajikan informasi mengenai kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro
- 3) Menyajikan iktisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

- 5) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu :

- 1) Masyarakat

Laporan keuangan pemerintah merupakan potret penggunaan uang rakyat dari awal hingga akhir periode, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam pelayanan public serta pengelolaan keuangan pemerintah.

- 2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa

Dewan perwakilan rakyat adalah pihak yang memberikan tugas dan wewenang atau otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah, sedangkan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa adalah badan yang melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

- 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman adalah pihak yang mempunyai sumber daya keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah

- 4) Pemerintah pusat membutuhkan laporan keuangan untuk menilai kinerja Gubernur dan Bupati/walikota sebagai wakil pemerintah.

2.3 Pengertian kas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Martini (dalam Karmila&Rahmazaniati 2022:3) mendefinisikan kas sebagai asset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan asset yang paling liquid dalam artian kas merupakan harta yang dimiliki suatu entitas maupun perorangan yang mudah dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu singkat serta alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Dari ke dua pengertian kas maka dapat disimpulkan bahwa kas merupakan uang tunai atau asset suatu entitas yang bersifat liquid yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional entitas tersebut.

2.4 Pengertian Laporan Arus Kas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mendefinsikan Laporan Arus Kas adalah laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Syafri (dalam Maruta,2017) Laporan arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada satu periode tertentu dengan mengklasifikasikan

transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan dan investasi. Menurut Pandowo & Kudhori Laporan keuangan merupakan salah satu laporan keuangan pemerintah daerah, dimana akan memberikan gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan (Tariza *et al.* 2023). Tanjung mendefinisikan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (Wehantouw & Tinagon, 2015).

Dari beberapa pengertian laporan arus kas diatas maka dapat dijelaskan bahwa laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai mutasi kas akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan maupun aktivitas transitoris.

2.4.1 Tujuan Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Sianipar dkk (dalam Susanto & Jonathan, 2021) tujuan disajikannya laporan arus kas adalah memberi informasi yang memungkinkan pengaruh dari suatu aktivitas terhadap posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara

kas dinilai oleh penggunaannya.

Menurut Horngen dan Harisson (2007:94) menyatakan bahwa laporan arus kas dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan berikut :

1. Untuk memprediksi arus kas masa depan
2. Untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen
3. Memprediksi kemampuan untuk membayar utang dan dividen

2.4.2 Manfaat Laporan Arus Kas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa laporan arus kas berguna untuk :

- a. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya
- b. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan
- c. Laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Menurut Mahmudi (2019:199) laporan arus kas memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya surplus atau defisit anggaran
- b. Untuk memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah dimana datang

- c. Untuk memprediksi kesinambungan fiscal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik.

2.4.3 Penyajian Laporan Arus Kas

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. Penerimaan perpajakan
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Penerimaan Hibah
- d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya
- e. Transfer masuk

Arus Keluar Kas untuk aktivitas Operasi terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang
- c. Bunga
- d. Subsidi

- e. Hibah
- f. Bantuan Sosial
- g. Belanja lain-lain /Tak Terduga
- h. Transfer keluar

2. Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan Pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari :

- a. Penjualan aset tetap
- b. Penjualan aset lainnya

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nono keuangan terdiri dari:

- a. Perolehan aset tetap
- b. Perlehan aset lainnya

3. Aktivitas Pembiayaan

Arus kas aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi kalim pihak lainnya terhadap arus kas pemerintah dan kalim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- a. Penerimaan Pinjaman
- b. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara
- c. Penerimaan dari Divestasi
- d. Penerimaan Kembali Pinjaman
- e. Pencairan Dana Cadangan

Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan antara lain :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah
- b. Pembayaran Pokok Pinjaman
- c. Pemberian Pokok Pinjaman
- d. Pembentukan Dana Cadangan

4. Aktivitas Non Anggaran

Arus kas aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan taspen dan askes. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk sedangkan arus keluar dari aktivitas non anggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

2.4.4 Bentuk Laporan Arus Kas

Bentuk Laporan Arus Kas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

No	Uraian	20X1	20X0
1	Arus kas dari aktivitas Operasi	XXX	XXX
2	Arus Kas Masuk	XXX	XXX
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Belanja Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset NonKeuangan	XXX	XXX
33	Arus Kas Masuk		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dan Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset lainnya	XXX	XXX

40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Perlatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Asset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan (40-48)	XXX	XXX
50	Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan	XXX	XXX
51	Arus Kas Masuk		
52	Pencairan Dana cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri -Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lemabaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinajam Dalam Negeri	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran	XXX	XXX
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dar Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)	XXX	XXX

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

2.4.5 Analisis Laporan Arus Kas

Menurut Mahmudi (2019) dalam menganalisis laporan arus kas ada beberapa Teknik yang digunakan yaitu :

1. Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Analisis pertumbuhan arus kas bermanfaat untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan kas dari masing-masing aktivitas selama beberapa tahun. Pertumbuhan arus kas dapat digunakan untuk :

- a. Menilai bagus tidaknya fundamental fiscal pemerintah daerah
- b. Menilai, mengevaluasi, dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan daerah
- c. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan

Analisis Pertumbuhan Arus Kas dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan tahun}_t = \frac{\text{ arus kas bersih tahun}_t - \text{ arus kas bersih tahun}_{t-1}}{\text{ arus kas bersih tahun}_{t-1}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Analisis Pertumbuhan Arus Kas

No	Arus kas bersih	Tahun		Pertumbuhan	
		Th _t	Th _{t-1}	Rp	%
1	Aktivitas Operasi				
2	Aktivitas Investasi				
3	Aktivitas Pembiayaan				
4	Aktivitas Transitoris				

Sumber: Arifin, Mustofa (2015) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

2. Analisis arus kas untuk setiap komponen meliputi :

$$\frac{\text{Arus Kas Masuk Tiap Aktivitas}}{\text{Total Kas Masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Arus Kas Keluar Tiap Aktivitas}}{\text{Total Kas Keluar}} \times 100\%$$

a) Analisis arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menggambarkan keluar masuknya kas untuk kegiatan operasional pemerintah. Arus kas dari aktivitas operasi mengukur jumlah kas yang dihasilkan dan jumlah kas yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai kegiatan operasionalnya terkait dengan pelayanan publik yang diberikan.

Tabel 2.3
Analisis Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih	Indikator
+ positif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah mempunyai kemandirian dana untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya • Adanya jaminan kesinambungan fiskal organisasi dalam jangka panjang yang lebih baik
(-) negatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengindikasikan adanya masalah keuangan dalam pemerintah daerah sehingga memerlukan suntikan dana dari luar untuk membiayai kegiatan operasional rutinnya

Sumber: Arifin, Mustofa (2015) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

b) Analisis arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi ini berkaitan dengan pengeluaran kas suatu entitas untuk memperoleh asset tetap atau penambahan asset tetap serta penerimaan kas atas penjualan asset tetap lama. Kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjaga kesinambungan operasional rutin pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan public dimasa depan.

Tabel 2.4
Analisis Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

arus kas bersih	Indikator
+ positif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah tidak melakukan investasi aset tetap secara agresif, bahkan menunjukkan kecenderungan adanya pelepasan/penjualan aset tetap
(-)negatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah dalam tahun tersebut telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap

Sumber : Arifin, Mustofa (2015) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang

c) Analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan menunjukkan arus kas yang terkait dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu struktur ekuitas dana dan kewajiban.

Tabel 2.5
Analisis Arus Kas Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih	Indikator
+ positif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengindikasikan masalah keuangan pada pemerintah daerah, misalnya berupa defisit yang besar jumlahnya sehingga memaksa digunakannya sumber pembiayaan internal maupun eksternal
(-) negatif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengindikasikan adanya kesehatan keuangan atau kinerja keuangan yang baik dimana terjadi surplus dana yang digunakan untuk menambah dana cadangan maupun investasi dalam bentuk penyertaan modal

Sumber: arifin, mustofa (2015) analisis laporan keuangan pemerintah kabupaten lumajang

d) Analisis arus kas dari aktivitas transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja dan beban pemerintah.

Tabel 2.6
Analisis Arus Kas Aktivitas Transitoris

Arus kas bersih	Indikator
+ positif	• Mengindikasikan adanya potongan-potongan SP2D yang belum disetorkan ke kas Negara atau kepada pihak ketiga
(-) negatif	• Mengindikasikan seluruh potongan-potongan SP2D dan penerimaan PFK telah disetorkan ke kas Negara atau Pihak ketiga

Sumber: arifin , mustofa (2015) analisis laporan keuangan pemerintah kabupaten lumajang

3. Analisis arus kas bebas

Arus kas bebas menunjukkan jumlah uang yang masi dimiliki pemerintah setelah melakukan kegiatan operasionalnya sehari hari dan melakukan belanja modal untuk pelayan publik. Arus kas bebas ini dimaksudkan untuk mengukur ketersediaan kas pemerintah daerah yang bebas penggunaannya sesuai dengan kebijakan daerah untuk pemenuhan kewenangan wajibnya. Arus kas bebas dapat dihitung dengan arus kas operasi dikurangi dengan pengeluaran kas untuk belanja modal.

Analisis Arus Kas Bebas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Arus kas bebas} = \text{ arus kas bersih aktivitas operasi} - \text{ arus kas keluar aktivitas investasi (belanja modal)}$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	(Ema Giyan Subekti dan Mohamad Hasanudin, 2009)	Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2008-2009	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan arus kas untuk setiap aktivitas arus kas keluar pada Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Demak memiliki kinerja keuangan kas yang baik, sedangkan perhitungan arus kas bebas menghasilkan peningkatan kinerja keuangan pada tahun berjalan.
2	(Hedi Pandowo dan Ahmad Kudhori) Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume 11, Nomor 01, Juli 2017	Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Pemerintah Kota Madiun)	Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa secara keseluruhan pertumbuhan arus kas tahun 2012-2016 dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari Pemerintah Kota Madiun, sedangkan untuk analisis arus kas bebas didapat hasil selama tahun 2012-2016 terdapat arus kas bebas yang cukup besar, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai kelebihan kas (surplus) yang dapat untuk menambah dana cadangan, melunasi hutang daerah atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
3	Anna Maria Sigita Grace Adam, 2017	Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013-2016	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2013 - 2015 bersaldo positif, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan arus kas bersih sehingga bersaldo negatif. (2) arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2013 menurun dan bersaldo negatif, sedangkan pada tahun 2014-2016 terjadi peningkatan dan bersaldo positif. (3) arus kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2013 bersaldo positif dan pada tahun 2014-2016 terjadi peningkatan dan bersaldo negatif. (4) arus kas bersih dari aktivitas

			transitoris pada tahun 2013 bersaldo positif, pada tahun 2014 arus kas bersih meningkat dan bersaldo negatif, sedangkan pada tahun 2015 arus kas bersih mengalami penurunan dan mengakibatkan arus kas bersih bersaldo positif dan pada tahun 2016 terjadi peningkatan arus kas bersih yang mengakibatkan arus kas bersih bersaldo positif.
4	Arini Zulfah dkk	Analisis Laporan Arus Kas Pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014-2016	Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2016 dari aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan menunjukkan kinerja keuangan yang baik dari pemerintah Kabupaten Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai kelebihan kas (surplus) yang dapat digunakan untuk menambah dana cadangan, melunasi hutang atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal.

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan maupun sumber daya keuangan yang dimiliki. Salah satu laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah ialah Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menginformasikan mengenai arus masuk kas dan arus keluar kas sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transitoris.

Adapun kerangka berpikir penulis sebagai landasan berpikir dalam membuat proposal penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

